

### **BAB III**

## **PERAN DIPLOMASI PARLEMEN DPR RI DALAM PENCEGAHAN ANCAMAN NARKOBA MELALUI AIPACODD**

### **3.1 Peran DPR RI dalam Pencegahan Ancaman Narkoba melalui Forum AIPACODD**

#### **3.1.1 Peran DPR RI dalam Pembentukan Norma di AIPACODD dengan Nilai Anti-Narkoba, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia**

*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs* (AIPACODD) merupakan organisasi parlementer regional yang dibentuk untuk memfasilitasi komunikasi dan hubungan diplomasi antar parlemen negara anggota ASEAN di bidang pemberantasan narkoba. Peran diplomasi parlemen masih belum cukup banyak mendapatkan sorotan publik. Secara tradisional, diplomasi hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Lisbet, S.I.P., M.Si, selaku Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, beliau menjelaskan bahwa ketika Anggota DPR RI terutama dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen sebelum melangsungkan tugasnya ke forum internasional, seringkali mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan

Kementerian Luar Negeri untuk sinkronisasi pesan diplomatik.<sup>161</sup> Situasi tersebut membuktikan bahwa diplomasi yang dilangsungkan oleh parlemen tidak bersifat mutlak tunggal tetapi sebagai pendukung pelaksanaan politik luar negeri. Seiring perkembangan globalisasi, situasi membutuhkan peran parlemen untuk aktif dalam urusan luar negeri. Permasalahan narkoba bersifat lintas negara dan bersifat regulatif, sehingga memerlukan forum multilateral regional parlemen sebagai wadah konstruksi bersama.<sup>162</sup>

DPR RI di AIPACODD tidak hanya sebagai peserta forum, tetapi turut andil dalam diplomasi parlemen Indonesia sebagai bentuk menjalankan fungsi konstiusionalnya sebagai parlemen negara. DPR RI telah melakukan diplomasi parlemen di AIPA sejak AIPA dibentuk pada awal 1970-an. Keaktifan Indonesia di AIPACODD dalam melakukan praktik diplomasi parlemen berkontribusi pada penanganan isu ancaman narkoba di ASEAN.<sup>163</sup> Analisis peran DPR RI di AIPACODD tersebut menyatakan bahwa konsep *soft power* yang dicetus oleh Joseph Nye yaitu upaya melakukan aktivitas mempengaruhi pihak lain tanpa menggunakan ancaman atau kekuatan, terimplementasi pada tindakan DPR RI dalam menjalankan perannya untuk mencegah ancaman narkoba di Indonesia melalui forum AIPACODD.<sup>164</sup> Melalui AIPACODD, DPR RI mengajak anggota

---

<sup>161</sup> Wawancara penulis dengan Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam Pusat Analis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Lisbet, Jakarta, 19 Februari 2025

<sup>162</sup> Syauqiyah, Asma Farah, and Insan Abdirrohman. "Diplomasi Parlemen Indonesia : Kepemimpinan DPR RI Dalam The 44th AIPA General Assembly 2023" 5, no. 2 (2024): 1307–15.

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Trisni, Sofia, and Ardila Putri. "Diplomasi Publik Dan Soft Power: Sama Atau Berbeda?" *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 12, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.25077/ajis.12.1.1-12.2023>.

parlemen ASEAN untuk bersama memerangi narkoba. AIPACODD harus mengambil peran untuk mencapai kawasan ASEAN bebas narkoba untuk membuka perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat negara domestik dan kawasan ASEAN.<sup>165</sup>

Norma internasional yang seringkali menjadi acuan etika dalam melakukan politik internasional merupakan hasil dari konstruksi sosial. Proses dialektika antar aktor internasional membentuk ide, gagasan, dan pemahaman bersama untuk mengarahkan aktor dalam situasi hubungan internasional. Wendt menyatakan bahwa perilaku aktor terhadap obyek ditentukan oleh pemahaman terhadap obyek yang terbentuk dari hasil konstruksi sosial. AIPACODD sebagai forum pembentukan norma, menjadi wadah konstruksi sosial bagi para aktor internasional untuk memberikan dan menyatakan pemahaman serta persepsinya tentang situasi permasalahan narkoba dan upaya pemberantasan narkoba di nasional sebagai pola konstruksi sosial. Hasil konstruksi sosial yang dilakukan akan membentuk norma internasional di AIPACODD yang menjadi resolusi bersama bagi negara-negara ASEAN dalam upaya kolektif pemberantasan narkoba di kawasan.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> Lisbet. "PERAN AIPACODD DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KAWASAN BEBAS NARKOBA ASEAN." Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Diakses pada 24/05/2026, pukul 09:13 WIB. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-238.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-238.pdf).

<sup>166</sup> Kusuma, Ardli Johan, and Ali Muhammad. "Analisis Perkembangan Norma Internasional ' War on Terror ' Dalam Perspektif Realis , Liberalis Dan Konstruktivis" 4, no. 1 (2019): 1–19.

Peran DPR RI dalam pembentukan norma di AIPACODD dengan nilai anti-narkoba, demokrasi dan hak asasi manusia dilakukan dengan pernyataan bahwa delegasi Indonesia menyatakan penyalahgunaan narkoba mengancam kehidupan kemanusiaan untuk hidup secara aman dan nyaman. Indonesia berkomitmen untuk menguatkan kebijakan nasional tentang pencegahan narkoba atas dasar demokrasi dan aspirasi masyarakat Indonesia. Delegasi DPR RI menyoroti pentingnya peran institusi regional ASEAN untuk menuntaskan permasalahan penting tersebut. Indonesia memandang bahwa permasalahan narkoba merupakan permasalahan multidimensional, tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dari sisi ekonomi, sosial, psikologi dan kebudayaan. Delegasi Indonesia menyatakan bahwa komitmen ASEAN akan mengurangi angka penyalahgunaan narkoba jika setiap negara bisa bergerak bersama.<sup>167</sup> Demokrasi menjadi nilai penting dalam proses konstruksi upaya pemberantasan narkoba di kawasan Asia Tenggara, dikarenakan setiap negara anggota ASEAN menjalin komunikasi secara terbuka tanpa intervensi, dengan tetap memperhatikan kedaulatan dan kebijakan masing-masing negara serta aspirasi masyarakat dalam negeri. Proses pengambilan keputusan di forum parlemen internasional berlangsung sangat demokratis, tidak ada negara yang memiliki hak veto. Keputusan diambil berdasarkan konsensus, disertai ketentuan bahwa delegasi parlemen negara tidak diwajibkan memberikan suara yang bulat dan bisa memberikan suara secara fleksibel. Nilai-nilai hak asasi manusia juga merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam proses konstruksi

---

<sup>167</sup> AIPACODD, *The 5th Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs "Addressing Challenges Together for Drug-Free ASEAN"*, AIPA Sekretariat, <https://aipasekretariat.org.org/aipacodd-report> (21/05/2026, 13:43 WIB)

pembentukan norma di AIPACODD dalam rangka menjamin setiap masyarakat di Asia Tenggara mendapatkan hak untuk hidup secara aman dan nyaman.<sup>168</sup>

Pertemuan AIPACODD ke-2 pada tahun 2019 diselenggarakan di Thailand dengan tema "*Alternative Development towards a Drug-Free ASEAN Community*". DPR RI tidak mengirimkan delegasi untuk menghadiri pertemuan tersebut, tetapi menyampaikan *Country Report* sebagai media persuasif terhadap sesama negara anggota AIPA. Indonesia menyampaikan bahwa dalam melakukan penegakan hukum pencegahan ancaman narkoba di dalam negeri meliputi, peningkatan kemampuan intelijen berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan reformasi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menindak permasalahan narkoba. Secara preventif, Indonesia melakukan kampanye "STOP NARKOBA" yang telah berjalan sejak tahun 2016. Kampanye tersebut berfokus pada segmentasi kelompok sosial, pekerja dan pelajar sekolah. Sampai pada tahun 2017, terdapat relawan kampanye sebanyak 30.120 orang. Program "Desa Bersinar" telah diinisiasikan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di pedesaan dan pinggiran kota. Program tersebut difokuskan untuk menysasar ke kalangan keluarga dan remaja sebagai kelompok dengan tingkat risiko pengguna penyalahgunaan narkoba yang tinggi. DPR RI menyebarkan norma dengan nilai anti-narkoba dengan pendekatan peningkatan sumber daya aparat penegak hukum dalam segi *soft skill* dan *hard skill* dan pendekatan preventif ke

---

<sup>168</sup> Rizqiah, Liza Faizah, and Agussalim Burhanuddin. "PERAN DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DALAM UPAYA MEMBANTU FIJI MENGHADAPI TANTANGAN KEAMANAN LINGKUNGAN." *PHENOMENON: Multidisciplinary Journal of Sciences and Research* 2, no. 1 (2024): 38–51.

akar rumput masyarakat dengan kampanye sosial berbasis komunitas. Norma pendekatan berbasis komunitas, akar rumput, keluarga dan individu, jika diterapkan oleh setiap negara anggota ASEAN, maka Indonesia akan mendapatkan manfaat yang sangat baik dan berdampak sampai ke seluruh kalangan masyarakat, mengingat Indonesia juga menerapkan kebijakan preventif dengan pendekatan mikro ke akar rumput.<sup>169</sup>

DPR RI menghadiri pertemuan AIPACODD ke-3 pada tahun 2020 dengan tema "*Turning Words into Actions towards A Drug-Free ASEAN Community*" di Vietnam. Indonesia mengajak negara anggota AIPA untuk melakukan pendekatan berbasis kampanye digital untuk berfokus pada kalangan remaja yang menjadi usia dengan tingkat resiko pelaku penyalahgunaan narkoba tertinggi dan pendekatan program berbasis akar rumput yaitu program Desa Bersih Narkoba. Pendekatan berbasis komunitas dan akar rumput dilaksanakan melalui penguatan komunitas lokal di daerah perbatasan, dalam hal ini Aceh. Pemerintah Indonesia merangkul komunitas lokal untuk menjadi relawan pengawas penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan masyarakat secara efektif dalam pemberantasan narkoba meliputi pemberdayaan masyarakat atau relawan di negara anggota ASEAN lainnya, mampu memberikan manfaat yang baik bagi Indonesia, dikarenakan Indonesia menerapkan

---

<sup>169</sup> AIPACODD, *2<sup>ND</sup> MEETING OF THE AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS (AIPACODD)*, AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (27/05/2026,12.00 WIB)

kebijakan inklusif, sehingga masyarakat juga mampu berperan penting dalam mencegah ancaman narkoba dari sisi *demand reduction*.<sup>170</sup>

DPR RI menghadiri pertemuan AIPACODD ke-4 pada tahun 2021 dengan tema "*Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN*" di Brunei Darussalam. Delegasi Indonesia menyampaikan proses pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan mengikuti kejahatan keuangan pencucian uang yang berkaitan dengan kejahatan penyalahgunaan narkoba. DPR RI menyatakan bahwa salah satu cara memutus transaksi penyalahgunaan narkoba yaitu mengikuti hilir kejahatan narkoba yaitu pencucian uang, sebagai penopang perdagangan ilegal narkoba. Indonesia menyerukan pentingnya penguatan intelijen berbasis teknologi, kapasitas aparat penegak hukum dan reformasi Standar Operasional Prosedur (SOP). Secara preventif, Indonesia mengembangkan Desa Bersinar/Bersih Narkoba yang telah diimplementasikan di 195 desa per 2021, pendekatan berbasis keluarga yang adaptif untuk edukasi anti-narkoba, kampanye digital yang bernama Rumah Edukasi Anti Narkoba, dan penguatan komunitas berbasis relawan. Pengawasan multi-sektor yang berkaitan dengan kejahatan narkoba perlu dilakukan secara bersama dan kolektif dengan sesama negara anggota ASEAN, seperti pencucian uang yang menjadi hilir kejahatan narkoba. Indonesia akan mengalami situasi yang membaik jika negara anggota ASEAN

---

<sup>170</sup> AIPACODD, *3<sup>RD</sup> MEETING OF THE AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS (AIPACODD)*, AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (27/05/2026, 12.12 WIB)

membagi fokusnya pada kejahatan pencucian uang yang berkaitan dengan narkoba, mengingat kejahatan keuangan tersebut juga bersifat lintas batas negara.<sup>171</sup>

DPR RI menghadiri pertemuan AIPACODD ke-5 pada tahun 2022 dengan tema "*Addressing Challenges Together for Drug-Free ASEAN*" di Kamboja. Delegasi Indonesia menyatakan bahwa ancaman narkoba telah menjadi permasalahan internasional dan ancaman terhadap kemanusiaan untuk hidup aman dan nyaman. Indonesia berkomitmen untuk menyempurnakan regulasi dalam negeri serta menyerukan kepada negara anggota AIPA untuk bersama-sama menyempurnakan kebijakan masing-masing negara. Indonesia menyoroti pentingnya peran institusi regional seperti AIPACODD untuk memberantas permasalahan narkoba. Kolaborasi lintas negara meliputi edukasi pencegahan ancaman narkoba, penegakan hukum, rehabilitasi, dan penelitian sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif. Upaya penyempurnaan regulasi yang dilakukan oleh Indonesia, sekaligus menyerukan kepada negara anggota AIPA untuk berfokus pada Zat Psikoaktif Baru, SDM aparat penegak hukum, dan pelayanan rehabilitasi. Indonesia menyoroti permasalahan narkoba yang bersifat multidimensional yang tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja tetapi juga ekonomi, sosial, kultural, dan psikologi, serta program pasca-rehabilitasi. Kolaborasi lintas negara yang efektif dan penyempurnaan fasilitas rehabilitasi akan menguntungkan bagi negara anggota ASEAN termasuk Indonesia, dikarenakan negara tidak memerlukan upaya dan

---

<sup>171</sup> AIPACODD, *4<sup>TH</sup> MEETING OF THE AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS (AIPACODD)*, AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (27/05/2026, 12.25 WIB)

anggaran yang banyak dengan hanya berfokus pada sisi *supply reduction* saja, tetapi juga *demand reduction*. Penyintas narkoba yang telah melaksanakan rehabilitasi dan kemudian kembali ke lingkungan masyarakat, bisa diberdayakan oleh negara untuk mencegah ancaman narkoba dengan keterlibatan masyarakat.<sup>172</sup>

DPR RI menjadi tuan rumah pada pertemuan AIPACODD ke-6 pada tahun 2023 dengan tema "*Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free ASEAN*" di Bogor, Indonesia. Rachmat Gobel selaku Wakil Ketua DPR RI yang sedang menjabat pada waktu itu, menyampaikan pandangan yang mewakili Indonesia bahwa permasalahan narkoba ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap upaya inklusivitas ekonomi. Indonesia menyoroti peran AIPACODD untuk tidak hanya berfokus pada permasalahan narkoba, tetapi juga sebagai sarana promosi perkembangan ekonomi inklusif di ASEAN. Delegasi Indonesia menyatakan bahwa permasalahan narkoba merupakan masalah bersama dan membutuhkan peran dari setiap negara anggota dan institusi regional dengan upaya yang komprehensif. Indonesia berhasil mendeteksi aset dan aliran pencucian uang yang terkait dengan kejahatan narkoba. Delegasi Indonesia mengajak dan menyerukan kepada negara anggota AIPACODD untuk meluaskan kontrolnya ke kejahatan keuangan yaitu pencucian uang, untuk lebih memudahkan pengawasan dan deteksi dini kejahatan narkoba. Ekonomi inklusif menjadi salah satu alternatif penting untuk bisa memberantas kejahatan narkoba akibat faktor permasalahan ekonomi di kalangan masyarakat dan hilir kejahatan narkoba di bidang ekonomi

---

<sup>172</sup> AIPACODD, *5<sup>TH</sup> AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS (AIPACODD)*, AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (27/05/2026,15.50 WIB)

yaitu pencucian uang. Selain daripada tujuan pencegahan ancaman narkoba, ekonomi inklusif juga mampu menopang ekonomi negara, sehingga negara dan masyarakat bisa berjalan dengan efektif untuk memberantas permasalahan narkoba.<sup>173</sup>

DPR RI menghadiri pertemuan ke-7 AIPACODD pada tahun 2024 dengan tema *"Strengthening the Role of Parliaments in Addressing Drug Matters for the Realisation of a Drug-Free ASEAN"* di Laos. DPR RI menyatakan bahwa kolaborasi yang kuat antara institusi negara dan kalangan masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional merupakan salah satu aspek keberhasilan tujuan pencegahan ancaman narkoba. Indonesia berharap dan menyoroti peran AIPACODD bersama negara anggota AIPA untuk menegaskan prinsipnya memberantas ancaman narkoba di kawasan secara bersama. DPR RI menyerukan kepada negara anggota AIPACODD untuk meningkatkan kekuatan komunitas, kalangan masyarakat, dan akar rumput melalui pencegahan, rehabilitasi dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum. Pendekatan ke masyarakat akar rumput dan komunitas, dapat mengintegrasikan keterlibatan masyarakat, negara dan organisasi regional secara efektif untuk bersama-sama mencegah ancaman narkoba di tingkat regional, nasional dan lokal.<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> AIPACODD, *THE 6<sup>TH</sup> MEETING OF AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS*, AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (28/05/2026,14:58 WIB)

<sup>174</sup> AIPACODD, *THE 7<sup>TH</sup> MEETING OF THE AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS*, AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (28/05/2026,15.10 WIB)

### 3.1.2 Peran DPR RI dalam Proses Penyeragaman Kebijakan dan Pertukaran Informasi di AIPACODD

DPR RI di forum AIPACODD dalam upaya pemberantasan ancaman narkoba di Indonesia berperan mengkonstruksikan kepentingan nasionalnya yaitu memberantas ancaman narkoba di dalam negeri melalui dialog penyeragaman kebijakan dan pertukaran informasi bersama dengan negara anggota parlemen AIPA. Konsepsi kawasan ASEAN yang bebas narkoba merupakan tujuan dari hasil konstruksi negara-negara Asia Tenggara yang sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara.<sup>175</sup> Setiap negara anggota AIPA dalam forum AIPACODD perlu melakukan dialog untuk menyeragaman kebijakan domestik dan melakukan pertukaran informasi, karena permasalahan ancaman narkoba merupakan permasalahan bersama, dengan kondisi kebijakan dalam negeri yang berbeda-beda. Dalam konteks yang lebih spesifik, Ibu Lisbet S.I..P, M.Si, selaku narasumber dari wawancara bersama penulis menyatakan bahwa pentingnya kolaborasi antarberbagai *stakeholder* di kawasan, mengingat AIPACODD merupakan wadah penting bagi parlemen anggota AIPA untuk bertukar informasi, berkolaborasi secara kebijakan dan mewujudkan cita-cita regional bersama yaitu kawasan bebas narkoba ASEAN.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> Saputra, Pradipta Nindyan, and Arfin Sudirman. "Pengembangan Konsep ' Indo - Pasifik ': Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia Di Kawasan Melalui ASEAN." *Jurnal Sosial Politik* 6 (2020): 214–24.

<sup>176</sup> Wawancara penulis dengan Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam Pusat Analis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Lisbet, Jakarta, 19 Februari 2025

Permasalahan narkoba di kawasan ASEAN perlu dilakukan dengan nilai keselarasan dan keharmonisasian kebijakan di setiap negara ASEAN. Ketidakselarasan kebijakan antar negara ASEAN dapat dilihat antara kebijakan Indonesia dan Malaysia tentang narkoba. Malaysia memprioritaskan prinsip *ultimum remidium* yaitu mengedepankan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dibanding sanksi pidana. Berbeda dengan Indonesia yang memprioritaskan prinsip *primum remidium* bagi pengguna dan pengedar narkoba, disertai kewajiban rehabilitasi.<sup>177</sup> Narkotika jenis ganja menjadi titik ketidakselarasan kebijakan yang signifikan di antara negara-negara ASEAN, baik untuk tujuan medis atau rekreasi. Thailand melegalkan ganja untuk tujuan makanan dan minuman, tetapi pelegalan tersebut tidak termasuk ke dalam penggunaan rokok ganja. Pelegalan ganja di Thailand dianggap perlu untuk kepentingan ekonomi negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sedangkan di Indonesia, melalui Pasal 8 UU Narkotika menyatakan bahwa ganja untuk kepentingan medis sekalipun, tetap dilarang digunakan. Adapun di Malaysia, produksi ganja akan dikenakan pidana seumur hidup dan hukuman cambuk. Di Singapura, kebijakan *Misuse of Drugs Act* Pasal 10 menyatakan tegas larangan budidaya tanaman ganja.<sup>178</sup>

Selain perbedaan regulasi secara normatif, pelaksanaan sanksi pidana mati bagi pelaku kejahatan narkoba di negara-negara ASEAN berdampak bagi pemberantasan ancaman narkoba di kawasan Asia Tenggara. Singapura merupakan

---

<sup>177</sup> Wear, Elsa Amalia. "Kondisi Dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba Di Beberapa Negara ASEAN." *Balobe Law Journal* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.1944>.

<sup>178</sup> *Ibid.*

negara dengan hukum paling berat di dunia, yaitu pemberian hukuman mati secara tegas kepada terpidana. Pelaksanaan pidana mati di Laos dan Brunei Darussalam masih mengadakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan narkoba, tetapi pelaksanaan tersebut terakhir dilakukan pada tahun 1989 di Laos dan tahun 1957 di Brunei Darussalam. Adapun di Kamboja sejak tahun 1989, pelaksanaan pidana mati telah dihapuskan dan dinyatakan dilarang oleh Konstitusi Kerajaan Kamboja. Sedangkan di Filipina, kebijakan hukuman mati dan rehabilitasi masih ditentukan berdasarkan rezim negaranya.<sup>179</sup> Ketidaksielarasan kebijakan dalam memberantas narkoba secara domestik dan regional, mengakibatkan kesenjangan sanksi yang memberikan dampak terganggunya efektivitas pemberantasan narkoba di Asia Tenggara. Kesenjangan sanksi tersebut mengakibatkan mudahnya peredaran narkotika dari suatu negara ke negara lainnya karena regulasi yang dibentuk lebih ringan, lebih berat, atau lebih fleksibel. Negara-negara ASEAN perlu menyelaraskan kebijakan dan melakukan pertukaran informasi untuk mencapai pemahaman bersama atas eksistensi ancaman narkoba dan situasi domestik dan kawasan yang masih rawan ancaman narkoba.<sup>180</sup>

DPR RI berperan melalui lampiran *country report* dalam proses keselarasan kebijakan dan pertukaran informasi pada pertemuan AIPACODD ke-2 pada tahun 2019 dengan tema "*Alternative Development towards a Drug-Free ASEAN Community*" di Thailand. Indonesia menyampaikan situasi permasalahan narkoba

---

<sup>179</sup> Wear, Elsa Amalia. "Kondisi Dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba Di Beberapa Negara ASEAN." *Balobe Law Journal* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.1944>.

<sup>180</sup> *Ibid.*

dengan kondisi Zat Psikoaktif Baru yang menjadi tantangan. Rute dan modus operandi yang menjadi tren oleh sindikat narkoba diambil melalui rute Selat Malaka dan Laut Sulawesi, Kalimantan dan Pesisir Barat Sumatra, serta modus operandi yang digunakan yaitu melalui pesawat penumpang dari negara-negara ASEAN, China, Eropa dan Afrika. Sepanjang tahun 2018, terdapat 169 kasus perdagangan narkoba dengan media paket, 11 kasus di perbatasan darat, 50 kasus di pelabuhan, dan 208 kasus di bandara. Pada tahun 2018, BNN bersama Polri dan Bea Cukai telah menginvestigasi sebanyak 40.343 kasus narkoba, menangkap 49.172 tersangka, mengamankan 35.34 ton Cannabis, 8 ton Metamphetamine dan lebih dari 1.5 juta tablet beserta 1.9 kg ekstasi. 70 kasus pencucian telah berkaitan dengan kejahatan narkoba dan mengungkap pelaku sebanyak 34 orang dan penyitaan aset sebanyak 17.6 Million US Dollar. Indonesia mengedepankan kebijakan pencegahan dengan kampanye "STOP NARKOBA" meliputi advokasi dan edukasi ke kalangan masyarakat dan "DESA BERSINAR" meliputi promosi edukasi ancaman narkoba terhadap keluarga dan remaja.<sup>181</sup>

DPR RI berkontribusi pada proses keselarasan kebijakan dan pertukaran informasi pada pertemuan AIPACODD ke-3 pada tahun 2020 dengan tema "*Turning Words into Actions towards A Drug-Free ASEAN Community*" di Vietnam. Pada tahun 2019, BNN menangkap 11.2 tons Cannabis, 5.01 ton Methamphetamine, 1.3 ton ekstasi, dan 1.65 ton Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol (PCC). Aparat penegak hukum telah menangkap 42.649 pelaku

---

<sup>181</sup> AIPACODD, 2ND MEETING OF THE AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS (AIPACODD), AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (28/05/2026,15.31 WIB)

kejahatan narkoba dan 33.371 kasus, meliputi 84 sindikat narkoba yang terdiri dari 27 kartel internasional, 38 sindikat lokal, dan 19 tahanan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pandemi Covid-19 mengakibatkan negara harus berupaya lebih keras untuk mengantisipasi peredaran ancaman narkoba dan meningkatkan keketatan kontrol perbatasan.<sup>182</sup>

DPR RI hadir untuk berperan dalam proses keselarasan kebijakan dan pertukaran informasi pada pertemuan AIPACODD ke-4 pada tahun 2021 dengan tema *"Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN"* di Brunei Darussalam. Pada era Covid-19, permasalahan ancaman narkoba menjadi ancaman yang sangat serius bagi Indonesia. Per Februari 2021, BNN mengungkapkan 1 ton methamphetamine. Polri menangkap pelaku sindikat narkoba yang berasal dari Iran dengan barang bukti berupa 1.2 ton methamphetamine yang dibawa melalui jalur laut. Peredaran narkoba ilegal tidak berhenti akibat pandemi, justru semakin berkembang peredarannya dan semakin mengancam kehidupan manusia. Pada tahun 2020, BNN dan Polri telah melakukan investiagsi dengan jumlah sebanyak 44.720 kasu dan menangkap 58.243 tersangka. Peran penting parlemen dilaksanakan melalui penyempurnaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan lebih berfokus pada rehabilitasi dan pencegahan.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> AIPACODD, 3RD MEETING OF THE AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS (AIPACODD), AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (28/05/2026,15.46 WIB)

<sup>183</sup> AIPACODD, 4TH MEETING OF THE AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS (AIPACODD), AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (28/05/2026,18.58 WIB)

DPR RI berperan dalam proses keselarasan kebijakan dan pertukaran informasi pada pertemuan AIPACODD ke-5 tahun 2022 dengan tema "*Addressing Challenges Together for Drug-Free ASEAN*" di Kamboja. Delegasi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia saat itu sedang dalam proses penyempurnaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berfokus pada Zat Psikoaktif Baru, pelayanan rehabilitasi, dan kapasitas aparat penegak hukum. Pada kebijakan tersebut, diperjelas juga perbedaan definisi antara '*drug addicts*', '*narcotics abusers*', dan '*victims of narcotics abuse*'. Penyempurnaan kebijakan tersebut juga rencananya akan mengatur pecandu, pelaku kejahatan, dan korban dari penyalahgunaan narkoba yang difokuskan untuk pelaksanaan rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif. Pada satu tahun belakangan, telah dilaporkan bahwa hampir satu juta masyarakat Indonesia terselamatkan dari pengaruh penyalahgunaan narkoba, mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran utama sindikat narkoba internasional.<sup>184</sup>

Pada tahun 2023, DPR RI hadir sebagai tuan rumah pada pertemuan AIPACODD ke-6 untuk mengambil bagian dalam proses keselarasan kebijakan dan pertukaran informasi dengan tema "*Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free ASEAN*" di Bogor, Indonesia. Rachmat Gobel selaku Wakil Ketua DPR RI saat itu menyatakan bahwa peran parlemen dalam pembentukan kebijakan pencegahan ancaman narkoba berfokus pada ekonomi inklusif melalui diplomasi parlemen. Kebijakan yang dibentuk oleh Indonesia meliputi pendekatan ke

---

<sup>184</sup> AIPACODD, 5TH AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS (AIPACODD), AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (28/05/2026,19.06 WIB)

komunitas dan akar rumput serta pelayanan rehabilitasi. Faktor utama yang menjadi tantangan bagi Indonesia adalah faktor geografisnya yaitu negara yang memiliki lebih dari 17.000 kepulauan, yang mengakibatkan sulitnya pengawasan dan kontrol peredaran narkoba. Penyempurnaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berfokus pada tim asesmen, penyidik, laboratorium pengujian dan peningkatan pelayanan rehabilitasi.<sup>185</sup>

DPR RI hadir pada pertemuan AIPACODD ke-7 tahun 2024 dengan tema *"Strengthening the Role of Parliaments in Addressing Drug Matters for the Realisation of a Drug-Free ASEAN"* di Laos untuk berperan dalam proses keselarasan kebijakan dan pertukaran informasi. Indonesia menyampaikan situasi tentang negaranya yang sangat kompleks, memiliki lebih dari 17.508 kepulauan dan 85.000 km garis pantai. Indonesia berbatasan dengan 10 negara dan dua benua. Secara kependudukan, Indonesia memiliki angka sebanyak 281 juta manusia pada tahun 2024, yang menjadi salah satu faktor target pasar besar untuk peredaran narkoba. Dengan situasi geografi tersebut, sebanyak 80% diselundupkan melalui jalur laut yang mengakibatkan sulitnya pengawasan. Secara kebijakan, Indonesia mengukur *supply* dan *demand* meliputi peningkatan penjagaan perbatasan, penegakan hukum, pengembangan kapasitas penegak hukum, pelayanan rehabilitasi, pendekatan komunitas melalui basis keluarga dan pelajar.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> AIPACODD, THE 6TH MEETING OF AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS, AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (28/05/2026,21:36 WIB)

<sup>186</sup> AIPACODD, THE 7TH MEETING OF THE AIPA ADVISORY COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS, AIPA Secretariat, <https://aipasecretariat.org/aipacodd-report/>, (28/05/2026,21.49 WIB)

### **3.2 Hambatan DPR RI dalam Pencegahan Ancaman Narkoba di Indonesia di Forum AIPACODD**

DPR RI mengalami hambatan yang tidak mudah dalam pencegahan ancaman narkoba di Indonesia di forum AIPACODD, mengingat secara geografis Asia Tenggara dikenal sebagai wilayah produksi narkoba dan Asia Tenggara memiliki angka konsumsi yang cukup tinggi sehingga menjadi ancaman kemanusiaan bagi Indonesia. Peredaran narkoba masih menjadi ancaman yang nyata di Asia Tenggara dan bersifat lintas negara, maka penanganannya memerlukan kerja sama antar negara. Perbedaan regulasi, definisi dan pandangan tentang narkoba oleh masing-masing negara di Asia Tenggara, mengakibatkan meningkatnya hambatan secara signifikan bagi DPR RI untuk mencegah ancaman narkoba di Indonesia.<sup>187</sup>

Hambatan berikutnya terletak pada peran DPR RI dalam fungsi diplomasi parlemen yang terbatas hanya untuk preventif, tidak bisa bertindak secara eksekusi atau pemberantasan narkoba. Kerangka diplomasi parlemen yang dilakukan terbatas pada konstruksi kepentingan nasional dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan kerja sama secara konkrit dan mutlak seperti selayaknya pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisbet, S.I.P., M.Si. selaku Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, beliau menjelaskan bahwa diplomasi parlemen yang

---

<sup>187</sup> Lisbet. "PERAN AIPACODD DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KAWASAN BEBAS NARKOBA ASEAN." Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Diakses pada 21/05/2026, pukul 17:19 WIB. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-238.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-238.pdf).

dilaksanakan oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif ditujukan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 (UU MD3) yang menjelaskan bahwa DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri, sehingga bukan menjadi aktor utama dalam diplomasi negara. Selain keterbatasan fungsi tersebut, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa fungsi diplomasi parlemen DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen menetapkan tugas untuk membina dan meningkatkan hubungan persahabatan antara DPR RI dan parlemen negara lain. Fungsi tersebut diharapkan mampu memasifkan representasi rakyat Indonesia ke kancah internasional.<sup>188</sup>

Hambatan DPR RI juga dipengaruhi oleh faktor eksternal negara yang tidak bisa dikendalikan secara efektif. Konflik dan perang yang terjadi di kawasan memberikan dampak terhadap peningkatan peredaran narkoba dan mengakibatkan sulitnya kontrol atas peredaran narkoba. Keberadaan kawasan *Golden Triangle* atau segitiga emas menjadi pemicu meningkatnya peredaran narkoba di kawasan. Kondisi geografis di Vietnam yang memiliki perbatasan darat yang panjang dengan China, Kamboja, dan Laos serta memiliki garis pantai yang panjang sehingga sangat memungkinkan terjadinya aktivitas penyelundupan narkoba. Laos secara geografis juga memiliki perbatasan darat yang panjang dengan China, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, sehingga sangat memudahkan sirkulasi

---

<sup>190</sup> Wawancara penulis dengan Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam Pusat Analis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Lisbet, Jakarta, 19 Februari 2025

peredaran narkoba di kawasan.<sup>189</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Lisbet, S.I.P, M.Si, selaku Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, menyampaikan bahwa DPR RI juga mengalami hambatan dilematis yaitu prinsip non-intervensi yang sangat dipatuhi negara-negara ASEAN. Prinsip non-intervensi tersebut menyulitkan pemerintah negara untuk segera mengambil tindakan tanpa melewati birokrasi dan diplomasi yang rumit.<sup>190</sup>

**Tabel 3.1 Ringkasan Peran DPR RI dalam Proses Pembentukan Norma di AIPACODD 2019-2024**

No	Tahun	Tema	Norma
1	2019	<i>“Alternative Development towards a Drug-Free ASEAN Community”</i>	Pencegahan dengan pendekatan kelompok sosial, pekerja, dan pelajar sekolah.
2	2020	<i>“Turning Words into Actions towards A Drug-Free ASEAN Community”</i>	Pendekatan berbasis kampanye digital untuk berfokus pada

<sup>189</sup> Lisbet. “PERAN AIPACODD DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KAWASAN BEBAS NARKOBA ASEAN.” Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Diakses pada 24/05/2026, pukul 09:46 WIB. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-238.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-238.pdf).

<sup>190</sup> Wawancara penulis dengan Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Lisbet, Jakarta, 19 Februari 2025

			<p>kalangan remaja yang menjadi umur dengan risiko pelaku penyalahgunaan narkoba tertinggi.</p>
3	2021	<p><i>“Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN”</i></p>	<p>Pendekatan melalui pembagian fokus ke aspek ekonomi yaitu kejahatan pencucian uang yang menjadi hilir dari kejahatan narkoba.</p>
4	2022	<p><i>“Addressing Challenges Together for Drug-Free ASEAN”</i></p>	<p>Penekanan kolaborasi lintas negara dan pemaksimalan layanan rehabilitasi sebagai pelaksanaan tujuan <i>demand reduction</i>.</p>
5	2023	<p><i>“Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free ASEAN”</i></p>	<p>Berfokus pada inklusivitas ekonomi dengan tujuan tetap</p>

			menghidupkan ekonomi dan kehidupan masyarakat serta memberantas kejahatan pencucian uang yang berkaitan dengan narkoba.
6	2024	<i>“Strengthening the Role of Parliaments in Addressing Drug Matter for the Realisation of a Drug-Free ASEAN”</i>	Pendekatan dengan komunitas dan masyarakat akar rumput melalui pencegahan, rehabilitasi dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum.